



**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI  
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
25 s.d 27 FEBRUARI 2016**

---

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 25 s.d 27 Februari 2016. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pengenaan Dana Bagi Hasil Pajak.

Sebagaimana kita ketahui, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara didalam menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus terus menerus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Dalam APBN Tahun Anggaran 2016, Pendapatan dalam negeri tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp1.820.514,1 miliar, atau meningkat 3,5 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546.664,6 miliar dan PNBPN sebesar Rp273.849,4 miliar. Penerimaan perpajakan tersebut meningkat sebesar 3,9 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015, sedangkan penerimaan PNBPN meningkat sebesar 1,8 persen dari target APBNP 2015. Sebagian dana yang bersumber dari APBN Tahun 2016 akan di transferkan kepada daerah sebagai Dana Perimbangan yang salah satunya merupakan Dana Bagi Hasil yang bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), dan antar daerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pada APBN tahun 2016 dialokasikan Dana Perimbangan sebesar Rp700.429,4 miliar dimana sebesar Rp51.523,1 miliar dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil Pajak.

Terkait dengan pengalokasian DBH Pajak tersebut, Komisi XI DPR RI banyak menerima masukan dari beberapa kepala daerah pada saat melakukan kunjungan kerja dan Anggota DPRD Provinsi yang melakukan audiensi dengan Anggota Komisi XI DPR RI. Salah satu masukan yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Anggota DPRD tersebut menyatakan bahwa salah satu potensi terbesar yang dapat menopang pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena hal tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas fiskal di daerah.

Oleh karenanya Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan hal-hal diatas agar didapatkan solusi dari permasalahan terkait dengan Dana Bagi Hasil. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga ingin mengetahui kondisi Badan Usaha yang melakukan aktivitas usaha di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kantor pusat atau tempat wajib pajak terdaftar di luar wilayah Kepulauan Riau serta jumlah pajak yang dapat dipungut dari badan usaha tersebut.

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1.	463	H. Jon Erizal, SE., MBA	F. PAN	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
2.	185	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	F. PDIP	Anggota
3.	204	MH. Said Abdullah	F. PDIP	Anggota
4.	341	H. Biem Triani Benjamin	F. GERINDRA	Anggota
5.	366	Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A	F. GERINDRA	Anggota
6.	401	H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP	F. DEMOKRAT	Anggota
7.	458	H. Muslim Ayub, SH., MM	F. PAN	Anggota
8.	519	H. Donny Ahmad Munir, ST., MM	F. PPP	Anggota
9.	15	Donny Imam Priambodo, ST., MM	F. NASDEM	Anggota
10.	545	Ir. Nurdin Tampubolon	F. HANURA	Anggota

## II. INFORMASI DAN TEMUAN

### A. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### 1. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Riau

##### a. Perekonomian

Kepri tumbuh sebesar 5,72% (yoy) melambat dibanding triwulan sebelumnya 6,25% (yoy), namun relatif lebih tinggi dibanding regional Sumatera dan Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 3,04% (yoy) dan 4,73% (yoy) pada triwulan III. Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor utama ekonomi Kepri yaitu sektor perdagangan besar eceran dan reparasi mobil-sepeda motor yang tumbuh sebesar 15,20% (yoy) lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

##### b. Neraca perdagangan

Pada Triwulan III 2015, neraca perdagangan domestik Kepri yang mencatatkan defisit sebesar 182,77% (yoy) lebih dalam dibanding kontraksi triwulan II sebesar 126,01% (yoy). Selain itu, kondisi perekonomian global dan nasional yang masih lesu juga turut menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Investasi yang tercermin dari PMTB tercatat tumbuh melambat 0,32% (yoy) dibanding periode sebelumnya sebesar 3,58% (yoy) yang dipengaruhi penurunan realisasi PMA.

Kinerja sektor utama Kepri tercatat melambat sejalan dengan kondisi permintaan yang menurun. Masih melambatnya permintaan global menekan kinerja industri pengolahan Kepri yang dipengaruhi perlambatan ekonomi negara Tiongkok dan Jepang. Sementara belum membaiknya harga komoditas turut menekan sektor pertambangan khususnya migas yang tercermin dari penurunan lifting migas. Perlambatan sektor industri sejalan dengan perlambatan ekspor yang hanya tumbuh 5,12% (yoy) melambat dibanding triwulan II sebesar 6,47% (yoy). Berdasarkan data ekspor, pelemahan kinerja terutama pada industri elektronik dan olahan CPO yang masing-masing mencatatkan kontraksi ekspor 15,50% (yoy) dan 11,35% (yoy) lebih dalam dibanding kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 13,83% (yoy) dan 4,85% (yoy). Sementara sektor pertambangan dan penggalian melambat 3,14% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan lalu yang tumbuh 4,55% (yoy) yang dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas serta penurunan hasil tambang/galian.

##### c. Tingkat Inflasi

Laju inflasi Kepri yang cukup tinggi pada triwulan laporan dipengaruhi tingginya realisasi inflasi Batam. Inflasi tahunan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan III di Batam

sebesar 8,55% (yoy) meningkat dibanding triwulan lalu 8,27% (yoy), sebaliknya di Tanjungpinang melambat sebesar 6,81% (yoy) dibanding triwulan lalu sebesar 7,84% (yoy).

Komoditas volatile food masih menjadi penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III. Laju inflasi volatile food yang tinggi pada periode Juli dan Agustus dipengaruhi tingginya permintaan berkenaan dengan adanya hari besar keagamaan (Idul Fitri) dan liburan sekolah serta terbatasnya pasokan makanan akibat kekeringan yang terjadi di Jawa. Kenaikan tarif angkutan udara pada Juli juga memberikan tekanan yang cukup besar pada kelompok administered prices. Sementara kenaikan tarif sekolah seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru mendorong inflasi pada kelompok inti.

#### d. Realisasi Belanja Pemda dan Belanja APBN

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemda tercatat masih rendah sehingga berpengaruh pada kinerja pertumbuhan ekonomi Kepri. Menurunnya pendapatan Pemda, baik pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan disebabkan oleh perlambatan ekonomi serta penurunan lifting dan harga minyak bumi. Sementara itu, penurunan realisasi belanja, disebabkan oleh realisasi sejumlah proyek pemerintah yang berjalan lambat, serta pengetatan penggunaan anggaran oleh Pemda karena berkurangnya pendapatan. Sampai dengan triwulan ketiga, realisasi pendapatan sebesar Rp5.569 miliar atau hanya mencapai 47,9% lebih rendah dibanding realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 63,07%. Adapun realisasi belanja sebesar Rp5.626 miliar atau mencapai 43,3% dari total pagu anggaran, juga lebih rendah dibanding capaian realisasi belanja periode yang sama tahun lalu sebesar 44,03%.

## 2. Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah tercatat masih rendah, sehingga berpengaruh pada kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	2012		2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	2.184.107.506.989,00	2.473.411.609.338,89	2.659.882.963.902,00	2.843.717.931.680,02	3.160.779.923.432,97	2.919.185.331.874,16
PAD	612.856.056.100,00	723.053.960.334,89	752.884.710.666,00	907.982.180.251,02	936.319.860.933,97	1.070.208.288.698,16
Dana Perimbangan	1.571.251.450.889,00	1.750.357.649.004,00	1.905.998.253.236,00	1.935.735.751.429,00	2.224.460.062.499,00	1.848.977.043.176,00

Dana perimbangan (Transfer Pusat ke Daerah) terdiri dari Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan sah yang berupa pendapatan hibah dari pemerintah dan dana penyesuaian (Dana Insentif Daerah). Dana perimbangan sendiri terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak;
2. Dana Bagi Hasil bukan Pajak;
3. Dana Alokasi Umum; dan
4. Dana Alokasi Khusus.

Rincian pendapatan yang bersumber dari **Dana Bagi Hasil Pajak** di Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi
2010	230.979.969.628,00	234.385.006.229,00
2011	214.876.039.533,00	216.974.136.062
2012	230.649.505.597,00	199.561.150.156,00
2013	175.966.697.025,00	198.090.541.595,00
2014	190.229.820.788,00	203.987.982.895,00

**Realisasi Pendapatan** Provinsi Kepulauan Riau hingga 31 Desember Tahun 2015 tercapai sebesar 89,25%, dimana dari target pendapatan sebesar **Rp2.791.361.075.565,00** dapat tercapai sebesar **Rp2.491.172.298.467,26**. Dari realisasi ini masih terdapat kekurangan capaian pendapatan sebesar Rp300.188.777.097,74 dari target yang telah ditetapkan.

Sedangkan **Dana Bagi Hasil Pajak** di Provinsi Kepulauan Riau hingga 31 Desember 2015 tercatat terealisasi sebesar Rp165.328.410.210,00 atau baru tercapai 65,62% dari jumlah yang ditargetkan yang sebesar Rp251.963.166.000,00.

Rincian pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak	Target Penerimaan 2015	Realisasi Penerimaan 2015	Lebih/Kurang Pencapaian Target	% Realisasi Pencapaian Target
PBB	109.238.262.000,00	79.693.467.810,00	(29.544.794.190,00)	72,95
Pajak Penghasilan Orang Pribadi	142.724.904.000,00	85.634.942.400,00	(57.089.961.600,00)	60,00
- Pasal 21	139.010.667.000,00	83.406.400.200,00	(55.604.266.800,00)	60,00
- Pasal 25/29	3.714.237.000,00	2.228.542.200,00	(1.485.694.800,00)	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>251.963.166.000,00</b>	<b>165.328.410.210,00</b>	<b>(86.634.755.790,00)</b>	<b>65,62</b>

### 3. Kendala yang dihadapi

Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak di daerah:

- Masih banyaknya perusahaan yang beroperasi di daerah namun pembayaran pajak dilakukan di kantor pusat yang tidak berada di daerah misalnya kontraktor migas;
- Penerimaan Dana Bagi Hasil yang turun sekitar 18-20% yang disebabkan banyaknya perusahaan yang tutup.
- Terjadi kelesuan disektor industri yang menyebabkan banyak perusahaan yang menutup usahanya karena sudah tidak kompetitif dan ketinggalan dari sisi kemajuan teknologi misalnya industri penghasil cakram.
- Banyaknya demonstrasi buruh sehingga berimbas pada turunnya investasi di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam karena perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan asing mengalami ketakutan mendirikan usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

## B. KANWIL DJP PAJAK RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

### 1. Target dan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kepulauan Riau

Target dan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

\*) Dalam Jutaan Rupiah

SUMMMARY	2011	2012	2013	2014	2015
<b>KEPULAUAN RIAU</b>					
RENCANA PENERIMAAN	4.211.231	3.550.885	5.035.999	5.103.130	7.841.023
REALISASI PENERIMAAN	3.003.989	3.777.323	4.578.498	5.491.903	5.878.817
CAPAIAN PENERIMAAN	71,3%	106,4%	90,9%	107,6%	75,0%
PERTUMBUHAN REALISASI PENERIMAAN		25,7%	21,2%	19,9%	7,0%
PERTUMBUHAN TARGET DARI REALISASI		18%	33%	11%	43%
<b>RIAU</b>					
RENCANA PENERIMAAN	10.347.854	9.245.595	11.402.210	11.991.986	17.347.859
REALISASI PENERIMAAN	7.537.791	9.126.234	9.855.040	11.778.818	13.282.824
CAPAIAN PENERIMAAN	72,8%	98,7%	86,4%	98,2%	76,6%
PERTUMBUHAN REALISASI PENERIMAAN		21,1%	8,0%	19,5%	12,8%
PERTUMBUHAN TARGET DARI REALISASI		22,7%	24,9%	21,7%	47,3%
<b>KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU</b>					
RENCANA PENERIMAAN	14.559.086	12.796.480	16.438.208	17.095.116	25.188.883
REALISASI PENERIMAAN	10.541.780	12.903.557	14.433.538	17.270.721	19.161.642
CAPAIAN PENERIMAAN	72,4%	100,8%	87,8%	101,0%	76,1%
PERTUMBUHAN REALISASI PENERIMAAN		22,4%	11,9%	19,7%	10,9%
PERTUMBUHAN TARGET DARI REALISASI		21,4%	27,4%	18,4%	45,8%

Jumlah wajib pajak yang terdaftar (WP Badan dan WP OP) serta besaran tax ratio di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

KPP	Jumlah WP Terdaftar		
	OP	Badan	Jumlah OP dan Badan
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>			
Madya Batam	-	990	990
Tanjung Balai Karimun	54.510	3.232	57.742
Bintan	50.661	2.749	53.410
Tanjung Pinang	67.873	9.607	77.480
Batam Utara	218.458	17.108	235.566
Batam Selatan	222.343	18.039	240.382
<b>Jumlah Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>613.845</b>	<b>51.743</b>	<b>425.188</b>
<b>Provinsi Riau</b>			
Pekanbaru Senapelan	87.433	13.186	100.619
Dumai	89.787	8.574	98.361
Rengat	106.842	7.308	114.150
Pangkalan Kerinci	98.750	7.127	105.877
Pekanbaru Tampan	128.134	20.150	148.284
Madya Pekanbaru	-	1.252	1.252
Bengkalis	86.691	9.553	96.244
Pangkalpinang	102.952	6.179	109.131

Besaran *Tax Ratio* di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

KEPULAUAN RIAU					
TAHUN	Pertumbuhan Ekonomi *)	PDRB ( Triliun *)	Inflasi **)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Tax Ratio
2011	6,67%	126,91	5,38%	3,00	2,37%
2012	8,21%	144,84	4,28%	3,78	2,61%
2013	6,13%	163,11	6,97%	4,58	2,81%
2014	7,32%	182,92	6,42%	5,49	3,00%
2015	6,02%	203,28	6,38%	5,88	2,89%

RIAU					
TAHUN	Pertumbuhan Ekonomi *)	PDRB ( Triliun *)	Inflasi **)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Tax Ratio
2011	5,01%	485,65	5,38%	7,54	1,55%
2012	3,55%	558,49	4,28%	9,13	1,63%
2013	2,61%	607,50	6,97%	9,86	1,62%
2014	2,70%	679,69	6,42%	11,78	1,73%
2015	0,22%	652,39	6,38%	13,28	2,04%

Sumber : \*) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (riau.bps.go.id) & Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri (kepri.bps.go.id)

\*\*) Bank Indonesia (www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data)

*Tax Ratio* di Provinsi Kepulauan Riau kecil dikarenakan beberapa perusahaan besar yang mempunyai kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau namun Kantor Pusat berada dan terdaftar sebagai Wajib Pajak diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Badan tidak disetorkan di Provinsi Kepulauan Riau, namun ditempat Kantor Pusat terdaftar. Sedangkan penghitungan PDRB memperhitungkan dimana dilakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, disebagian besar wilayah Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kawasan bebas sehingga PPN dibebaskan.

## 2. Potensi Penerimaan Pajak di Provinsi Kepulauan Riau

Target penerimaan pajak Kanwil DJP Riau dan kepulauan Riau tahun 2016 sebesar Rp26,37 Triliun, mengalami kenaikan sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan tahun 2015. Rincian target penerimaan pajak per Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KPP	TARGET PENERIMAAN 2016
<b>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>	
Tanjung Pinang	1.060.471.524.300
Batam Utara	1.018.382.274.971
Madya Batam	4.116.777.289.420
Tanjung Balai Karimun	624.076.338.610
Bintan	425.283.446.367
Batam Selatan	1.018.922.446.019
<b>JUMLAH KEPULAUAN RIAU</b>	<b>8.263.913.319.687</b>
<b>PROVINSI RIAU</b>	
Pekanbaru Senapelan	1.449.465.893.984
Dumai	1.782.666.852.170
Rengat	1.438.476.595.966
Pekanbaru Tampan	1.971.631.207.049
Madya Pekanbaru	6.212.428.480.571
Bengkalis	2.557.702.719.861
Pangkalpinang	1.008.460.604.335



Gambaran potensi penerimaan pajak di Kepulauan Riau didominasi dari sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 35%, Perdagangan Besar dengan kontribusi penerimaan sebesar 15%, konstruksi dengan kontribusi 11%, Jasa Keuangan dan Asuransi dengan kontribusi sebesar 75 dan Administrasi Pemerintahan dengan kontribusi 6%.

### 3. Kendala yang dihadapi

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

#### a. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a) Sumber Daya Manusia:  
Jumlah *Account Representative* (AR) dan fungsional masih kurang bila dibandingkan luas wilayah kerja dan wajib pajak yang harus diawasi.
- b) Ketersediaan dana penggalan potensi yang terbatas;
- c) Sarana transportasi dan fasilitas kantor masih kurang;
- d) Fasilitas rumah dinas untuk pegawai masih kurang;
- e) Sarana transportasi yang masih kurang untuk menjangkau Wajib pajak di wilayah kepulauan.

Data AR yang tersedia di Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

<b>ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DI LINGKUNGAN KANWIL DJP RIAU DAN KEPRI</b>					
NO	UNIT KERJA	JUMLAH KPP	AR		
			TERSEDIA	DIBUTUHKAN	Kurang
1	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	6	100	148	48
2	PROVINSI RIAU	8	137	196	59
Jumlah		<b>14</b>	<b>237</b>	<b>344</b>	<b>107</b>

Perbandingan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah *Account Representative* (AR) dan fungsional pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:

KPP	Jumlah WP Terdaftar			Jumlah Pegawai		WP Yang Diawasi tiap AR	WP Yang Diawasi tiap Fungsional Pemeriksa
	OP	Badan	Jumlah OP dan Badan	AR	Fungsional		
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>							
Madya Batam	-	990	990	20	25	50	40
Tanjung Balai Karimun	54.510	3.232	57.742	12	3	4.812	19.247
Bintan	50.661	2.749	53.410	13	3	4.108	17.803
Tanjung Pinang	67.873	9.607	77.480	16	9	4.843	8.609
Batam Utara	218.458	17.108	235.566	20	6	11.778	39.261
Batam Selatan	222.343	18.039	240.382	19	5	12.652	48.076
<b>Jumlah Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>613.845</b>	<b>51.725</b>	<b>665.570</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>38.242</b>	<b>133.037</b>
<b>Provinsi Riau</b>							
Pekanbaru Senapelan	87.433	13.186	100.619	19	9	5.296	11.180
Dumai	89.787	8.574	98.361	16	12	6.148	8.197
Rengat	106.842	7.308	114.150	15	4	7.610	28.538
Pangkalan Kerinci	98.750	7.127	105.877	14	2	7.563	52.939
Pekanbaru Tampan	128.134	20.150	148.284	19	12	7.804	12.357
Madya Pekanbaru	-	1.252	1.252	20	33	63	38
Bengkalis	86.691	9.553	96.244	15	3	6.416	32.081
Bangkinang	103.052	6.179	109.231	19	5	5.749	21.846
<b>Jumlah Provinsi Riau</b>	<b>700.689</b>	<b>73.329</b>	<b>774.018</b>	<b>137</b>	<b>80</b>	<b>46.648</b>	<b>167.175</b>
<b>Total Kwl DJP Riau dan Kep. Riau</b>	<b>1.314.534</b>	<b>125.054</b>	<b>1.439.588</b>	<b>237</b>	<b>131</b>	<b>84.891</b>	<b>300.212</b>

#### b. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi triwulan IV Tahun 2015 dari BPS Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa Ekonomi Kepulauan Riau tahun 2015 tumbuh 6,02 persen melambat dibanding tahun 2014 yang sebesar 6,62%.
- b) Adanya penurunan skala usaha wajib pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi pipa migas;

- c) Regulasi terkait ekspor *raw material* bahan tambang;
  - d) Data dan informasi dari pihak-pihak terkait masih kurang;
  - e) Masih adanya wajib pajak yang memberikan identitas yang tidak valid;
  - f) Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah;
  - g) Kurangnya dukungan dari pihak luar.
4. Terkait dengan badan usaha yang melakukan aktivitas usaha di Provinsi Kepulauan Riau, perusahaan-perusahaan besar yang beraktivitas di Provinsi Kepulauan Riau tidak seluruhnya terdaftar sebagai kantor pusat di Kepulauan Riau. Dalam hal kantor pusatnya terdaftar diluar Provinsi Kepulauan Riau, maka kewajiban perpajakannya PPh Badan dilakukan ditempat Kantor Pusat terdaftar, sehingga Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau tidak memiliki akses untuk melihat data setoran PPh Badan atas Wajib pajak tersebut.
- Jumlah Wajib Pajak yang Kantor Pusatnya terdaftar di luar Provinsi Kepulauan Riau adalah 3.416 Wajib Pajak, sehingga potensi PPh Badan atas Wajib pajak tersebut dibayarkan diluar Kepulauan Riau.

#### 5. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Kanwil Ditjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

##### a. Intensifikasi:

Usaha untuk mengoptimalkan kemampuan membayar pajak sesuai dengan kewajiban uang sebenarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengawasan pembayaran masa;
2. Analisis data SPT beserta lampirannya;
3. Penggalan potensi pajak sektor dominan/unggulan;
4. Himbuan Wajib Pajak berbasis *benchmarking*, *mapping* dan *profiling*;
5. Pemanfaatan data, baik data internal (data transaksi perpajakan) maupun eksternal (data dari instansi lain);
6. Analisis transaksi *transfer pricing* antar perusahaan group;
7. Optimalisasi pengawasan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara;

8. Tindakan *law enforcement*, yaitu melakukan pemeriksaan difokuskan pada wajib pajak yang dengan kepatuhan kewajiban perpajakan yang rendah atau *tax gap* tinggi dengan kategori diantaranya:
  - Wajib pajak yang bergerak dalam sektor industri perhotelan, *ship building and repair*, penunjang infrastruktur, dan elektronik;
  - Wajib pajak yang tidak mengikuto *reinventing policy* sesuai PMK 91/PMK.03/2015.
9. Penagihan aktif melalui Blokir Rekening, Penyitaan Aset, Pencegahan ke Luar Negeri dan Penyanderaan (*gijzeling*).

**b. Ekstensifikasi**, yaitu kegiatan dalam rangka memperluas basis pajak yang dilakukan antara lain dengan:

1. Membentuk Tim Satgas Ekstensifikasi tingkat KPP dengan berbasis wilayah, yang bertugas mencari data, khususnya WP Pribadi Non Karyawan.
2. Melakukan ekstensifikasi/penyisiran ke lokasi-lokasi potensial, yaitu sentra perdagangan, Perumahan Mewah dan *high risk building*.
3. Pengawasan Wajib Pajak baru;
4. Pengawasan Wajib Pajak tidak aktif (non efektif), yang tidak pernah lapor dan setor namun terdapat data transaksi;
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi geotagging dan pelaksanaan monografi fiskal, yaitu merupakan upaya penggalian potensi melalui ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah;
6. Pelayanan berbasis teknologi antara lain:
  - Penerapan sistem pelaporan SPT online;
  - Penerapan sistem pembayaran pajak secara online: *ebiling*, mini atm dan EDC (*electronic data capture*).
7. Pemanfaatan data internal dan data eksternal:
  - Data Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Aset, antara lain: Wajib Pajak Pemilik saham, pemilik properti mewah, pialang, dan barang mewah lainnya;
  - Data Transaksi antara lain: *capital gain*, pedagang pengumpul, dan *unreported income*.

## 6. Perkembangan realisasi penagihan piutang pajak

- ✓ Saldo tunggakan pajak di Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

No	KPP	2011	2012	2013	2014	2015
Kepulauan Riau						
1	KPP Pratama Tanjungpinang	134.152	203.694	188.524	193.398	271.624
2	KPP Pratama Batam Utara	21.833	72.660	87.737	82.743	78.849
3	KPP Madya Batam	26.008	315.376	434.955	428.572	433.292
4	KPP Pratama Tanjung Balai Karim	46.298	72.239	67.866	37.062	43.154
5	KPP Pratama Bintan	56.582	109.375	113.395	87.825	107.697
6	KPP Pratama Batam Selatan	-	-	-	-	4.632
<b>Jumlah Kepulauan Riau</b>		<b>284.873</b>	<b>773.344</b>	<b>892.476</b>	<b>829.600</b>	<b>939.247</b>
Riau						
1	KPP Pratama Pekanbaru Senapeli	22.131	114.772	148.316	125.233	115.327
2	KPP Pratama Dumai	54.881	102.863	105.330	122.115	120.523
3	KPP Pratama Rengat	154.546	257.028	249.484	216.072	201.141
4	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	7.095	86.035	118.656	202.114	177.053
5	KPP Madya Pekanbaru	18.449	223.717	308.543	418.777	498.987
6	KPP Pratama Bengkalis	134.763	211.047	198.660	184.672	204.291
7	KPP Pratama Bangkinang	77.036	117.610	109.182	123.143	132.841
8	KPP Pratama Pangkalan Kerinci	231.877	342.885	312.579	162.737	200.596
<b>Jumlah Riau</b>		<b>700.779</b>	<b>1.455.957</b>	<b>1.550.752</b>	<b>1.554.864</b>	<b>1.650.758</b>
<b>Jml Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau</b>		<b>985.651</b>	<b>2.229.301</b>	<b>2.443.228</b>	<b>2.384.464</b>	<b>2.590.006</b>

- ✓ Target pencairan tunggakan tahun 2015 adalah sebesar Rp738,82 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp709,06 miliar.
- ✓ Realisasi penagihan piutang pajak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam Miliar Rupiah

WILAYAH	2011		2012		2013		2014		2015	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Riau	474,17	660,77	331,08	362,98	384,71	274,58	387,50	364,95	545,00	500,63
Kepri	148,37	206,76	210,62	157,29	225,61	98,36	201,16	114,70	190,82	160,49
<b>Jumlah</b>	<b>622,54</b>	<b>867,52</b>	<b>541,70</b>	<b>520,27</b>	<b>610,32</b>	<b>372,94</b>	<b>588,66</b>	<b>479,66</b>	<b>735,82</b>	<b>661,12</b>

## 7. Saran dan masukan

Berikut masukan dan saran dari Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Kepulauan Riau terkait masalah dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraa tugas:

1. Permasalahan di Kawasan Bebas Batam khususnya terkait endorsement, diharapkan penyelesaiannya dipercepat sehingga keresahan pelaku usaha di Batam segera bisa teratasi untuk menghindari henggangnya perusahaan dari wilayah tersebut;
2. Kesulitan data atas penggalian potensi pajak berbasis transaksi keuangan, sehingga diharapkan dapat dibuka akses transaksi keuangan dengan lebih mudah;
3. Pemberian Insentif Fiskal di FTZ yang mencapai rata-rata Rp19 triliun per tahun ternyata tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan untuk tahun 2015 mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,62% di tahun 2014 menjadi 6,02% di tahun 2015.
4. Pelarangan ekspor raw material bahan tambang bauksit dan timah mempengaruhi wajib pajak yang bergerak di bidang tambang di Pulau Bintan.

## C. BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM

### 1. Alokasi Anggaran BP Batam

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran BP Batam yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan tugas teknis BP Batam dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

*dalam rupiah*

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Porsentase (%)
2013	959.677.812.000	846.585.700.515	88,22
2014	1.105.855.296.000	906.325.238.947	81,96
2015	1.247.283.955.000	1.029.372.474.507	82,53

### 2. Kinerja Keuangan

Unit bisnis jenis layanan yang dilakukan di BP Batam yang terkait degan tugas dan wewenang BP Batam antara lain:

- a. Unit Pelabuhan Laut;
- b. Unit Bandara;

- c. Unit Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
- d. Unit Rumah Sakit;
- e. Unit Pengelolaan Lahan;
- f. Unit Pengelolaan Air dan Limbah;
- g. Unit Pemukiman dan Perumahan.

Dari sisi pendapatan, rata-rata terjadi peningkatan penerimaan rata-rata sebesar 10%. Pendapatan Operasional BP Batam dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Unit	2015	2014	2013
1	Kantor Pusat	514.84	539.52	520.33
2	Bandar Udara	149.76	86.15	85.59
3	Pelabuhan Laut	204.82	143.23	120.04
4	Kantor Air	24.45	86.53	16.58
5	RSOB	89.47	17.93	78.54
6	Kantor Jakarta	1.56	1.70	2.45

### 3. Pendapatan BP Batam

Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak dari BP Batam terdiri dari sumber-sumber yang diterima di Kantor Pusat-Batam yang meliputi pengelolaan lahan, pemanfaatan aset, pengelolaan Data Center dan Sistem Informasi dan Lalu Lintas Barang, sedangkan pendapatan yang bersumber dari unit kerja mandiri meliputi Pengusahaan Bandara, Pelabuhan Laut, Rumah Sakit dan Pengelolaan Air dan Limbah.

Pendapatan BP Batam dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni periode 2013 sampai dengan 2015 terdapat peningkatan yang cukup baik dan signifikan dimana pada tahun 2013 dari target pendapatan yang sebesar Rp687,27 miliar terealisasi mencapai Rp932,24 miliar atau sebesar 136%. Sementara itu pada tahun 2014 target pendapatan sebesar Rp697,81 miliar dapat terealisasi sebesar Rp981,84 miliar atau sebesar 140%, sedangkan pada tahun 2015 dari target yang sebesar Rp758,98% dapat terealisasi sebesar Rp984,78 atau 129%.

#### **4. Koordinasi BP Batam dengan Pemerintah Daerah**

Koordinasi yang dilakukan oleh BP Batam dengan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik, khususnya dalam layanan-layanan yang diberikan oleh BP Batam tetapi pembayaran retribusi dilakukan melalui Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Pajak Pusat yang dipotong oleh BP Batam meliputi PPh 21, PPh 22 dan PPh 23 serta PPh 4 ayat (2).

#### **5. Kendala yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BP Batam terdapat kendala dan masalah yang dihadapi yaitu:

1. Tarif dan jenis PNBPN yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 153 Tahun 2003 masih dalam proses perubahan di Kementerian Keuangan.
2. Peralatan bongkar muat belum dilengkapi secara memadai.
3. Keterbatasan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana pada unit bisnis sehingga potensi pendapatan tidak dapat diusahakan secara optimal.

## **II. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik pada saat melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut:

- a. Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan jawaban tertulis serta masukan terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak secara lengkap dan komprehensif kepada Komisi XI DPR RI. Dengan ini, maka Komisi XI DPR RI dapat menyalurkan aspirasi dan masukan dari daerah untuk diteruskan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah Pusat.
- b. Komisi XI DPR RI meminta data lebih lanjut terkait Perusahaan-Perusahaan yang melakukan operasi usaha di daerah Provinsi Kepulauan Riau tetapi memiliki NPWP di Pusat.
- c. Komisi XI DPR RI meminta kepada Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan target-target pajak yang memiliki potensi besar di daerah.



- d. Terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak, Komisi XI DPR RI meminta kepada Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat memberikan support terhadap pembagian DBH yang adil, hal ini mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi juga perlu ditingkatkan di daerah.
- e. Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan usulan terkait Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengingat Provinsi Kalimantan Timur memiliki SDA yang besar namun tingkat pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah bahkan negatif.
- f. Terkait dengan adanya usulan dari BP Batam mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah untuk penyelesaian dualisme wewenang antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian terkait.
- g. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan baik oleh Pemerintah Daerah, BP Batam maupun Kanwil Ditjen Pajak dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan lanjutan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

### III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

**Jakarta, Februari 2016**

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Ketua,**

**H. JON ERIZAL, SE., MBA**

**A- 463**